AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 2, Mei 2025

Pengungkapan Anti Korupsi dari Perspektif Corporate Governance

Liwa Wul Hayati[1*], Maya Indriani Suma'a[2], Della Putri Andini[3], Irfan Mei Isra[4], Zaitul[5]
Universitas Bung Hatta, Indonesia
hayatiliwawul@gmail.com[1*]

Submitted: 15th February 2025 | **Edited**: 24th April 2025 | **Issued**: 01st May 2025

Cited on: Hayati, L. W., Suma'a, M. I., Andini, D. P., Isra, I. M., & Zaitul, Z. (2025). Pengungkapan Anti Korupsi dari Perspektif Corporate Governance. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(2), 630-644.

ABSTRACT

Indonesia still faces serious challenges related to corruption as reported by Transparency International's website, in 2023, With a score of 34, Indonesia is in 115th position out of 180 countries in the assessment of public sector corruption levels based on the Corruption Perception Index. The low score indicates that the level of corruption in the country is still very high. The purpose of this study is to determine and understand the relationship between corporate governance and disclosure of anti-corruption policies. In this study, corporate governance was measured using four indicators, namely the existence of an independent board of commissioners, gender diversity in the board of commissioners, the existence of foreign commissioners, and the number of members of the board of commissioners. Company size and age are used as control variables in this study, which includes 40 companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022-2023 period, consisting of 37 state-owned enterprises and 3 non-state-owned enterprises. The purposive sampling method was used in this study to select the sample, which resulted in a total of 28 companies. Regression analysis is used to measure how much influence the independent variable has on the dependent variable. The results of the study show that the existence of an independent board of commissioners does not have a significant impact on the level of disclosure of anti-corruption practices by companies. Although the independent board of commissioners has no effect, this study found that gender diversity, the presence of foreign commissioners, and the size of the board of commissioners significantly increase anti-corruption disclosure. In addition, the size and age of the company are also proven to have the same effect.

Keywords: Anti-Corruption Disclosure, Corporate Governance, Indonesia

PENDAHULUAN

Pengungkapan kebijakan anti-korupsi adalah suatu bentuk transparansi yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam memberantas praktik korupsi. Program ini umumnya mencakup kebijakan seperti larangan suap, pengendalian gratifikasi, kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pembentukan dan penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing). Tingginya jumlah kasus korupsi membuat Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seolah-olah praktik ini telah menjadi bagian dari budaya. Korupsi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara finansial maupun non-finansial, yang mengancam kinerja dan keberlanjutan perusahaan serta mengurangi

kepercayaan investor untuk menginvestasikan modal (Tirtasari & Hartomo, 2019). Pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan skor 34 dalam indeks persepsi Korupsi (CPI) dari Transparency International, mendapatkan di posisi 115 dari 180 negara. Indeks ini menggunakan skala 0-100, rendah skornya semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara. Skor 34, yang bahkan belum mencapai setengah dari skala maksimum, menegaskan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi (International, 2024). Corporate governance merupakan salah komponen yang dapat meningkatkan pengungkapan anti korupsi. Walaupun penelitian corporate governance dan governance outcome lainnya sudah diteliti oleh Hamdi et al.,(2021), Ilona et al., (2019, 2021), Zaitul et al., (2021, 2023), Zaitul, Elfiswandib, et al., (2019), Zaitul, Melmusi, et al., (2019) namun hubungannya dengan pengungkapan anti korupsi masih sedikit.

Meskipun penelitian saat ini tentang pengungkapan anti-korupsi dan tata kelola perusahaan memberikan pemahaman penting tentang hubungan antara kedua bidang ini, masih ada kekurangan penelitian yang signifikan. Tata kelola perusahaan telah diakui sebagai mekanisme penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi, terutama di daerah yang dilanda korupsi. Literatur menyatakan bahwa kerangka pengelolaan perusahaan yang efektif dapat memitigasi risiko korupsi dengan mendorong budaya integritas dan kepatuhan di antara entitas Perusahaan (Ahmed & Anifowose, 2023; Wijayati et al., 2015). Namun, studi-studi yang ada sering kali berfokus pada aspek struktural tata kelola perusahaan tanpa secara memadai menangani dimensi perilaku yang mempengaruhi praktik anti-korupsi. Misalnya, meskipun peran komposisi dewan dan dukungan manajemen dalam mempromosikan inisiatif anti-korupsi diakui (Previtali & Cerchiello, 2017, 2023a), masih kurang penelitian empiris yang mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dengan budaya organisasi dan perilaku karyawan untuk membentuk hasil anti-korupsi.

Selain itu, Penelitian Rusli & Felix (2022) membuktikan bahwah dewan komisaris independen terbukti meningkatkan secara signifikan transparansi perusahaan dalam hal kebijakan anti-korupsi. Namun, temuan tersebut bertentangan dengan penelitian Herdi & NR (2020), yang menyimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu, menunjukan ketidakkonsistenan. Perbedaan riset ini dengan penelitian terdahulu diantaranya penambahan varaibel

independen berupa keberagaman gender dewan komisaris, keberadaan anggota dewan komisaris dari luar negeri, ukuran dewan komisaris, Serta objek riset ini berfokus pada informasi yang berkaitan dengan periode penelitian 2022 dan 2023 dapat di temukan secara lengkap dalam laporan Tahuna yang dipublikasikan oleh perusahaan BUMN tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak variable tata Kelola Perusahaan dan pengungkapan anti korupsi.

LANDASAN TEORI

Corporate Governance

Tata kelola perusahaan (corporate governance) adalah suatu sistem yang di rancang untuk mengatur dan mengawasi operasional perusahaan, termasuk hubungan antara pemilik modal, jajaran direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Good corporate governance (GCG) tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menekankan transparansi dan akuntabilitas, yang berperan krusial dalam mencegah praktik korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dewan direksi, seperti komposisi dan independensinya, dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan yang etis (Rossouw, 2014; Yan-Leung et al., 2011). Dalam konteks ini, pengungkapan informasi yang jelas dan jujur menjadi kunci untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan (Xia et al., 2018; Yan-Leung et al., 2011). Pengungkapan anti-korupsi merupakan elemen penting yang memiliki hubungan erat dengan penerapan good corporate governance, mencakup kebijakan dan praktik yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani korupsi dalam organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik tata kelola yang kuat dan transparan cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah (Dinh & Calabrò, 2018; Dlamini et al., 2017).

Pengungkapan yang baik mengenai kebijakan anti-korupsi dapat memperkuat reputasi perusahaan dan kepercayaan investor, yang selanjutnya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Siagian et al., 2013). Di era pandemi COVID-19, tantangan baru muncul dalam praktik tata kelola perusahaan, termasuk dalam hal pengungkapan anti-korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki struktur tata kelola berkualitas dapat lebih baik dalam menghadapi krisis dan tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas (Ishtiaq & Mushtaq, 2021; Mathew &

Sivaprasad, 2020). Oleh karena itu, perusahaan perlu terus memperkuat praktik tata kelola mereka, termasuk pengungkapan anti-korupsi, untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan di pasar. Secara umum, penerapan tata kelola perusahaan yang efektif dan pengungkapan anti-korupsi saling terkait dan berkontribusi pada kinerja perusahaan yang lebih baik. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang kuat dan transparan, perusahaan tidak hanya dapat mencegah korupsi tetapi juga meningkatkan nilai dan reputasi mereka di mata pemangku kepentingan.

Pengungkapan Anti Korupsi

Pengungkapan anti korupsi merupakan langkah perusahaan dalam menyampaikan komitmennya untuk memerangi korupsi. Menurut *Standar Globar Reporting Initiative* (GRI) untuk pengungkapan pencegahan korupsi di perusahaan menggunakan GRI 205. Pengungkapan anti-korupsi merupakan hal yang penting dalam tata kelola perusahaan dan pemerintahan bertujuan agar memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Pengungkapan ini mencakup informasi yang relevan mengenai upaya perusahaan atau organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan anti-korupsi dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi, penelitian seperti yang di lakukan oleh Blanc et al.,(2017) dan Nobanee et al.,(2020). Salah satu alasan utama pentingnya pengungkapan anti-korupsi adalah bahwa transparansi dapat mengurangi ruang untuk praktik korupsi. Ketika informasi mengenai kebijakan dan praktik anti-korupsi dipublikasikan, hal ini dapat menciptakan tekanan sosial bagi perusahaan dalam beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, penelitian oleh (Blanc et al., 2017) mengungkapkan bahwa pengungkapan anti-korupsi dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan upaya mereka dalam memerangi korupsi, karena adanya pengawasan dari publik dan media (Blanc et al., 2017).

Pengungkapan tersebut juga dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen dan dewan komisaris, yang berperan penting dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di perusahaan (Vian, 2020). Namun, meskipun pengungkapan anti-korupsi memiliki potensi untuk mengurangi korupsi, tantangan tetap ada. Beberapa perusahaan mungkin enggan untuk mengungkapkan informasi terkait praktik anti-korupsi mereka karena takut akan dampak negatif terhadap reputasi atau kinerja mereka. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung pengungkapan ini menjadi hal yang

sangat penting, termasuk kebijakan yang mendorong transparansi dan perlindungan bagi whistleblower (Hoang et al., 2022; Ratu & Rahajeng, 2024).

Dewan Komisaris Independen

Hasil riset sebelumnya menunjukan bahwah keberadaan dewan komisaris independen sangat berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilutas perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada seberapa terbuka perusahaan dalam melaporkan kebijakan anti-korupsi. Tirtasari & Hartomo (2019) menyatakan bahwa perusahaan cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan kebijakan anti-korupsi ketika dewan komisaris memiliki tingkat indepedensi yang tinggi. Studi tersebut menggunakan analisis regresi logistik, yang mengungkapkan perusahaan yang mempunyai dewan komisaris independen lebih cenderung mengadopsi dan mengungkapkan kebijakan anti-korupsi. Lebih lanjut, (Hartomo & Hutomo, 2020) juga menekankan bahwa struktur kepemilikan dan independensi dewan komisaris berkontribusi pada transparansi anti-korupsi. Mereka mengungkapkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan terbukti meningkatkan transparansi dalam pelaporan kebijakan anti-korupsi. Hasil Ini mendukung temuan (Zahwa et al., 2023), yang menyatakan bahwa indepedensi dewan komisaris berkontribusi untuk menaikan citra perusahaan melalui kontrol agar lebih ketat terhadap laporan keuangan, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi yang dapat mengarah pada praktik korupsi.

Keberagaman Gender Dewan Komisaris

Menurut (Jaggi et al., 2021) keberadaan dewan perempuan lebih memperhatikan pengungkapan yang lebih komprehensif dan transparan, terutama informasi non-keuangan. Perempuan dianggap memiliki nilai etika, orientasi sosial, dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap tuntutan pemangku kepentingan. Variabel ini disimbolkan KGDK. Keberagaman gender dalam dewan komisaris dapat membawa perspektif yang lebih beragam dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas kebijakan anti-korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan dapat mengurangi tingkat korupsi, karena perempuan cenderung memiliki norma sosial yang lebih kuat terkait dengan etika dan transparansi (Jha & Sarangi, 2014). Selain itu, keberagaman gender dapat meningkatkan akuntabilitas, karena dewan yang beragam lebih mungkin untuk

mempertanyakan dan menantang praktik yang tidak etis (Kubbe & Merkle, 2022). Kedua, pengungkapan anti-korupsi yang lebih baik dapat dihasilkan dari keseimbangan gendere di jajaran komisaris. Penelitian mengindikasikan bahwasannya perusahaan dengan dewan komisaris yang beragam cenderung lebih transparan dalam pengungkapan informasi terkait anti-korupsi (Blanc et al., 2017). Hal ini dapat didasari oleh fakta bahwa anggota dewan perempuan sering kali lebih peduli terhadap isu-isu sosial dan etika, yang mendorong mereka untuk mendorong pengungkapan yang lebih baik dalam hal kebijakan anti-korupsi (Yangzom et al., 2024).

Keberadaan Dewan Komisaris Dari Luar Negeri

Secara umum keberadaan dewan komisaris dari luar negeri dapat diidentifikasi melalui kerangka organisasi perusahaan dengan meninjau latar belakang dewan komisaris serta memeriksa apakah ada orang dari Negara lain dalam susuan itu. (Pradono & Widowati, 2016). Keberadaan dewan komisaris luar negeri dapat membawa pengalaman internasional, pengetahuan yang lebih beragam, dan pandangan baru yang dapat memperkaya strategi perusahaan. Beberapa temuan yang menunjukkan bahwa struktur tata kelola perusahaan, termasuk komposisi dewan komisaris, memiliki peran krusial dalam mendukung program anti-korupsi perusahaan. Sebagai contoh, (Previtali & Cerchiello, 2023) menyatakan bahwa dukungan dari manajemen puncak sangat penting untuk meningkatkan tingkat pengungkapan anti-korupsi, dan komposisi dewan komisaris dapat memberikan dukungan tersebut. Selain itu, penelitian oleh (Hartomo & Hutomo, 2020) menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi. Lebih lanjut, Blanc et al. menekankan bahwa pengungkapan anti-korupsi dapat memperkuat upaya perusahaan dalam memerangi korupsi dengan membuka dialog dengan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tekanan sosial terhadap perusahaan untuk lebih transparan (Blanc et al., 2018). Ini mengindikasikan bahwa keberadaan Dewan Komisaris asing mungkin membawa perspektif dan praktik internasional yang dapat memperkuat trasnparansi dalam pengungkapan anti-korupsi. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengungkapan anti-korupsi yang baik dapat berkontribusi pada reputasi perusahaan dan meningkatkan kinerja, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan Dewan Komisaris asing mungkin lebih termotivasi untuk meningkatkan transparansi.

Ukuran Dewan Komisaris

Dalam studi yang meneliti hubungan antara jumlah anggota dewan komisaris dan transparansi anti-korupsi, diduga bahwah ukuran dewan komisaris mempengaruhi seberapa sering perusahaan mempublikasikan informasi terkait praktik anti-korupsi. . Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa Dewan Komisaris berperan krusial dalam mengawasi serta memastikan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seberapa luas perusahaan mempublikasikan informasi mengenai tanggung jawab sosial (CSR) serta pengungkapan informasi lainnya, yang mencakup aspek anti-korupsi (Afifah & Immanuela, 2021; Amin, 2020; Novianti & Eriandani, 2022). Jumlah anggota dewan komisaris yang lebih banyak dapat menghadirkan beragam perspektif dan keahlian dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen serta mendorong pengungkapan informasi yang lebih transparan. Misalnya, penelitian oleh Puspita mengungkapkan bahwa ukuran Dewan Komisaris memberi dampak besar pada performa financial, yang bermakna bahwa Dewan Komisaris dengan jumlah anggota lebih besar berpotensi untuk lebih efektif dalam mengawasi praktik-praktik perusahaan, termasuk pengungkapan anti-korupsi (Puspita, 2024). Selain itu, penelitian oleh Amin menegaskan bahwa ukuran Dewan Komisaris memiliki hubungan signifikan dengan keterbukaan informasi dalam tata kelola perusahaan, yang mencakup pengungkapan informasi terkait anti-korupsi (Amin, 2020).

METODE PENELITIAN

Riset n ini menerapkan pendekatan kuantitatif yang menganalisis data sekunder yang diperoleh dari *annual report* yang diterbitkan perusahaan, dan laporan relevan lainnya yang ada di situs resmi Bursa Efek Indonesia, situs perusahaan serta sumber terpercaya lainnya. Populasi penelitian ini mencakup perusahaan BUMN serta tiga perusahaan non BUMN yang memiliki dewan komisaris dari luar negeri dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan total 37 perusahaan. Penelitian ini memilih sampel menggunakan teknik purposive sampling, sehingga menghasilkan 28 perusahaan sebagai sampel akhir. Beberapa variabel yang di analisis meliputi independensi dewan komisaris, keberagaman gender, keberadaan komisaris asing, ukuran dewan komisaris

dan pengungkapan anti-korupsi. Selain itu, ukuran dan usia perusahaan juga diikutsertakan sebagai variabel kontrol.

Penelitian ini mengadopsi rumus dan item yang sama dengan penelitian Previtali & Cerchiello (2023) adalah sebagai berikut: PAK = Indeks Pengungkapan kebijakan Anti Korupsi. Item yang di ungkapkan di beri nilai 1, sedangkann item yang tidak diungkapkan diberi nilai 0. Komisaris independen merupakan individu yang tidak memiliki keterkaitan atau hubungan dengan pihak manapun sehinggah dapat beretindak secara mandiri. Variabel ini disimbolkan dengan DKI. Pengukuran DKI adalah jumlah dewan komisaris independen / jumlah anggota dewan komisaris. Dewan komisaris asing (DKA) diukur dengan rumus sebagai berikut jumlah dewan komisaris asing / total dewan komisaris. Keberagaman gender diukur dengan menggunakan Blau index dengan rumus Bi = 1- $\sum pi^2$. Dimana Bi = blau index, dan Pi = fraksi dari populasi dalam tiap kelompok. Ukuran dewan komisaris dikur dengan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran Perusahaan diukur dengan menggunakan total aset Perusahaan. Umur Perusahaan di ukur dengan selisih tahun penelitian - tahun berdiri Perusahaan. Metode analisa data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji outlier, uji asumsi klasik, analisis regresi, dan pengujian hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan 28 perusahaan sebagai sampel akhir yang mewakili 76% dari total populasi perusahaan BUMN ditambah tiga perusahaan non BUMN yang memiliki dewan komisaris asing. Berdasarkan uji outlier, variabel pengungkapan anti korupsi, variabel dewan komisaris independen, variabel keberagaman gender dewan komisaris, variabel dewan komisaris dari luar negeri, dan Variabel umur perusahaan tidak terdapat outlier (0%). Variabel ukuran dewan komisaris terdapat 1 outlier (1,78%), rentang nilai dari 2 hinggah 15 dengan nilai rata-rata 7,17 dan penyimpangan standar sebesar 2,83. Variabel ukuran perusahaan terdapat 5 outlier (8,92%), nilai minimum 1,64, nilai maksimum 2.174,22, rata-rata 265,36, dengan standar deviasi 567,55.

Uji Normalitas

Kriteria penilaian dalam penelitian ini mengacu pada Manning & Munro (2004), untuk jumlah observasi di bawah 300, batas rentang yang digunakan adalah antara -2,59

hinggah +2,59. Hasil olah data, interpretasi data awal menunjukkan bahwa terdapat dua variabel tidak normal karena S/SE berada di luar kriteria di atas. Kemudian kedua variabel tersebut ditransformasikan ke dalam SQRT dan LN, sehingga ketujuh variabel tersebut memiliki nilai S/SE pada rentang -2,59 dan +2,59 sehingga memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil olah data menunjukan bahwah variabel-variabel independen dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi. Hal ini ditunjukan dengan nilai toleransi yang melebihi 0,05 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Untuk menguji autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson. Tabel 4 menunjukan bahwah nilai Durbin Watson adalah 1,813 yang berada dalam rentang yang menunjukan tidak adanya autokorelasi. Namun, hasil uji heteroskedastisitas menunjukan adanya masalah heteroskedaastisitas yang kemudian diatasi dengan metode regresi menggunakan uji heteroskedasticity corrected regression.

Uji Hipotesis Simultan

Berdasarkan hasil olah data, nilai R square sebesar 0,87. Maka 87% pengungkapan anti korupsi dipengaruhi oleh empat variabel independen yaitu dewan komisaris independen, keberagaman gender dewan komisaris, keberadaan dewan komisaris dari luar negeri, dan ukuran dewan komisaris. Sedangkan sisanya sebesar 14,1% dipengaruhi variable lain tidak ada dalam model penelitian. Kemudian berdsarkan hasil olah data juga diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 56,698 dengan signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Dengan nilai signifikan di bawah 0,05, model regersi digunakan unutk membuat prediksi terkait variabel penelitian.

Tabel 1. Uji Regresi

	B	t	Sig.	Simpulan
Konstanta	0,79	21,05	0,00	
Dewan Komisaris Independen	-0,07	-1,10	0,28	Ditolak
Keberagaman gender dewan komisaris	0,27	4,35	0,00	Diterima
Keberadaan dewan komisaris dari luar negeri	-0,08	-2,78	0,01	Diterima
Ukuran dewan komisaris	0,02	6,37	0,00	Diterima
Ukuran perusahaan	0,00	-15,10	0,00	Signifikan
Umur perusahaan	0,00	4,01	0,00	Signifikan
F statistic (F sig)		56,70 (0,00)		
R kuadrat		0,87		
Durbin watson		1,813		

Sumber: Hasil olah data, 2024

Pembahasan

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Analisis terhadap hipotesis pertama menunjukan bahwah koefisien regresi untuk dewan komisaris independen adalah -0,07 dengan tingkat signifikan 0,28. Karena nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 dapat di simpulkan bahwah dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti-korupsi. Keberadaan independensi dewan komisaris masih belum mampu memberikan kontrol dan pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan operasional perusahaan termasuk upaya untuk pencegahan korupsi melalui implementasi dan pengungkapan anti korupsi yang merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen. Dalam konteks perusahaan BUMN, pengungkapan anti korupsi sering kali dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kepentingan politik. Faktor eksternal, seperti intervensi pemerintah, dapat mengurangi efektivitas dewan komisaris independen dalam memaksimalkan fungsi pengawasan mereka. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Herdi & NR, 2020), yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Pengaruh Keberagaman Gender Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Hasil hipotesis kedua menunjukan bahwah keberagaman gender dalam dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan anti-korupsi. Hal ini di dukung oleh koefisien regresi sebesar 0,269 dan tingkat signifikan 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Keberagaman gender dalam dewan komisaris berpotensi meningkatkan jumlah pengungkapan anti korupsi, dengan asumsi bahwa anggota dewan wanita lebih cenderung fokus pada prosedur serta isu-isu sosial dan lingkungan, seperti pengungkapan anti korupsi. Keberadaan komisaris wanita berperan sebagai pengawas dalam organisasi. Mereka dapat mengambil keputusan strategis, mengembangkan kebijakan yang akan diterapkan, dan membawa perspektif yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan, sehingga berkontribusi positif terhadap upaya transparansi perusahaan. Hasil ini selaras dengan dengan penelitian yang di lakukan oleh Tirtasari & Hartono (2019), tetapi bertolak belakang dengan temuan Lubis & Martia (2024) yang menemukan bahwah keberagaman gender dewan komisaris tidak memiliki pengaruh dengan pengungkapan manajemen risiko perusahaan.

Pengaruh Keberadaan Dewan Komisaris Asing Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Temuan dari hipotesis ketiga menunjukkan bahwa koefisien regresi keberadaan dewan komisaris dari luar negeri adalah -0,081, nilai signifikan yang di peroleh adalah 0,008, yang mana lebih rendah dari tingkat alfa 0,05 sehingga keberadaan dewan komisaris dari luar negeri memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi. Komisaris asing mungkin memiliki pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang hukum yang berbeda dibandingkan dengan komisaris dalam negeri, terutama terkait dengan standar tata kelola dan pengungkapan anti-korupsi di negara asal mereka. Standar ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik yang selaras dengan norma internasional, sehingga meningkatkan kualitas pengungkapan anti-korupsi dan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan adanya kelemahan dalam kontribusi dewan komisaris dari luar negeri terhadap pengungkapan anti korupsi. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dalam melakukan pengawasan akibat tidak tinggal di Indonesia. Sebagai contoh, PT Telkomsel memiliki komisaris luar negeri, Yuen Kuan Moon, yang berdomisili di Singapura. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan langsung dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan perusahaan, termasuk dalam mendukung upaya pengungkapan anti korupsi. Hasil penelitian ini mendukung temuan Andini (2020) yang menunjukan bahwah keberadaan dewan komissaris asing mempengaruhi pengungkapan akuntansi sumber daya manusia.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Hasil dari hipotesis empat menunjukan bahwah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ani-korupsi. Hal ini didukung oleh koefisien regresi sebesar 0,023 dan tingkat signifikan 0,000, yang mana lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Menurut Chen (2019) semakin banyak anggota dewan komisaris suatu perusahaan, semakin efektif mereka dalam mengawasi kinerja manajemen. Dewan komisaris berperan penting dalam mengawasi kinerja direksi. Jika direksi tidak mengambil keputusan yang tepat, dewan komisaris memiliki hak memberikan nasihat. Sebagai perwakilan dari pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders), dewan komisaris juga dapat meminta perusahaan untuk tidak semata-mata terpusat pada manfaat bisnis semata, melainkan juga mempertimbangkan manfaat

bagi stakeholder. Hasil riset ini sejalan dengan temuan Hartomo et al. (2020) yang menegaskan bahwah ukuran dewan komisaris berkorelasi positif dengan pengungkapan anti-korupsi. Selain itu, Priantana & Yustian (2011) juga menemukan bahwah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Variabel Kontrol

Hasil analisis menunjukan bahwah ukuran perusahaan memilki pengaruh pada pengungkapan anti-korupsi, dengan nilai signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,005) dan koefisien beta positif 0,000. Variabel umur perusahaan memiliki nilai sig. sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,005 dan beta positif sebesar 0,002. Hal ini menandakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkan anti korupsi di Perusahaan.

KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan dewan komisaris independen tidak menunjukan adanya pengaruh signifikan pada pengungkapan anti korupsi. Keberadaan dewan komisaris independen di dalam perusahaan masih belum bisa mengawasi memadai dalam operasional perusahaan oleh manajemen, termasuk dalam implementasi serta pengungkapan anti korupsi. Hasil menunjukkan keberagaman gender dewan komisaris berdampak signifikan pada pengungkapan anti korupsi. Komisaris wanita di perusahaan mampu berperan sebagai pengawas dalam organisasi dan berkontribusi positif terhadap upaya transparansi perusahaan, mereka mampu mengambil keputusan yang strategis, mengembangkan kebijakan yang akan diterapkan, dan membawa perspektif yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaan dewan komisaris dari luar negeri memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi berarti, dewan komisaris dari luar negeri membawa pengalaman serta standar tata kelola yang lebih ketat, termasuk komitmen terhadap transparansi dan praktik bisnis yang bersih. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi, semakin banyak anggota dewan komisaris, semakin efektif pengawasan terhadap manajemen yang pada akhirnya meningkatkan pengungkapan praktik anti-korupsi. Variabel kontrol dalam penelitian ini, menunjukan bahwah baik ukuran maupun umur perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan prakti anti-korupsi. Keterbatasan penelitian ini adalah periode waktu penelitian yang relative singkat, hanya mencakup dua periode. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas

rentang waktu dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keberadaan komite audit.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, R. N., & Immanuela, I. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jrma | Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, *9*(2).

Ahmed, A., & Anifowose, M. (2023). Corruption, Corporate Governance, and Sustainable Development Goals in Africa. *Corporate Governance*, *24*(1), 119–138. https://doi.org/10.1108/cg-07-2022-0311

Amin, M. R. A. (2020). Pengaruh Kepemilikan Domistik, Kepemilikan Asing, Ukuran Dewan Komisasris, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transparansi Tata Kelola Perusahaan. *Akuisisi Jurnal Akuntansi*, *15*(2), 35–41. https://doi.org/10.24127/akuisisi.v15i2.458

Andini, R. L. (2020). *Pengaruh Keberadaan Dewan Komisaris Asing, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Market To Book Value Terhadap Pengungkapan Akuntansi Sumber Daya Manusia*. *2507*(February), 1–9.

Blanc, R., Branco, M. C., & Patten, D. M. (2018). Cultural Secrecy and Anti-corruption Disclosure in Large Multinational Companies. *Australian Accounting Review*, *29*(2), 438–448. https://doi.org/10.1111/auar.12231

Blanc, R., Islam, M. A., Patten, D. M., & Branco, M. C. (2017). Corporate Anti-Corruption Disclosure. *Accounting Auditing & Accountability Journal*, *30*(8), 1746–1770. https://doi.org/10.1108/aaaj-02-2015-1965

Chen, M. (2019). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Dan Kepemilikan Asing Terhadap Luas Pengungkapan Csr. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, *10*(2), 141. https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6721

Dinh, T. Q., & Calabrò, A. (2018). Asian Family Firms Through Corporate Governance and Institutions: A Systematic Review of the Literature and Agenda for Future Research. *International Journal of Management Reviews*, *21*(1), 50–75. https://doi.org/10.1111/ijmr.12176

Dlamini, B., Tapera, J., & Chivasa, S. (2017). Can Sound Corporate Governance Alleviate Corporate Failure? A Study of the Zimbabwean Financial Services Sector. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, *9*(2), 88. https://doi.org/10.22610/jebs.v9i2.1652

Hamdi, M., Ilona, D., & Zaitul. (2021). *Supervisory board and Indonesia ' s company internationalisation*. *28*, 148–160.

Hartomo, O. D., & Hutomo, S. H. P. (2020). The Ownership Structure, Board of Directors, Diversification, and Disclosure of Anti-Corruption Policies. *Assets Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, *9*(2), 121–130. https://doi.org/10.25273/jap.v9i2.5660

Hartomo, O. D., Hutomo, S. H., & Pranatio. (2020). *The ownership structure, board of directors, diversification, and disclosure of anti-corruption policies*. 121–130.

Herdi, F., & NR, E. (2020). *Pengaruh profitabilitas, leverage , dan komposisi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan corporate social responsibility*. *2*(1), 2428–2444.

Hoang, K., Doan, H. T., Tran, T. T., Nguyen, T. X., & Le, A. Q. (2022). Anti-Corruption Campaign and Firm Financial Performance: Evidence From Vietnam

Firms. *Evaluation Review*, *46*(2), 103–137. https://doi.org/10.1177/0193841x211072707

Ilona, D., Zaitul, & Ethika. (2019). Supervisory board and company borrowing : the case of developing economics. *Journal of Reviews on Global Economics*, *8*, 730–738.

Ilona, D., Zaitul, Z., & Kwakye, E. O. (2021). Management Boards and Indonesia's Company Innovation Performance. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, *9*(2), 119–130. https://doi.org/10.21009/jpeb.009.2.4

International, T. (2024). *Indeks Persepsi Korupsi 2023*. Tranparency,International. https://transparansi.id/wp-content/uploads/2024/01/20240130-Presentasi-CPI-2023-1.pdf

Ishtiaq, M., & Mushtaq, H. (2021). Corporate Governance Regulations and Practices Under COVID-19 Crisis: Time to Rethink. *Journal of Law & Social Studies*, *3*(2), 153–158. https://doi.org/10.52279/jlss.03.02.153158

Jaggi, B., Allini, A., Ginesti, G., & Macchioni, R. (2021). Determinants of corporate corruption disclosures: evidence based on EU listed firms. *Meditari Accountancy Research*, *29*(1), 21–38. https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2019-0616

Jha, C. K., & Sarangi, S. (2014). Women and Corruption: What Positions Must They Hold to Make a Difference? *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2434912

Kubbe, I., & Merkle, O. (2022). *Introduction. Gender and Corruption: The Role of Norms*. 1–24. https://doi.org/10.4337/9781802205831.00008

Lubis, Y. S., & Martias, D. (2024). *Pengaruh Gender Keberagaman Dewan Komisaris , Risiko Komite Manajemen , Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan*. *2*(2), 181–194.

Manning, M. L., & Munro, D. (2004). *The Business Survey Resesrcher's SPSS Cookbook* (2nd ed.). Pearson Education.

Mathew, S., & Sivaprasad, S. (2020). Corporate Governance Practices in the Context of the Pandemic Crisis. *SSRN Electronic Journal*.

Nobanee, H., Atayah, O. F., & Mertzanis, C. (2020). Does Anti-Corruption Disclosure Affect Banking Performance? *Journal of Financial Crime*, *27*(4), 1161–1172.

Novianti, N., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Inovasi*, *18*(1), 208–216.

Pradono, N. S. H., & Widowati, E. H. (2016). Pengaruh Komisaris Asing, Direktur Asing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Intellectual Capital. *Kinerja*, *20*(2), 132–148. https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i2.840

Previtali, P., & Cerchiello, P. (2017). Structuring supervisory board for an anti-corruption strategy : a new application of a compliance system. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, *17*(1), 48–63.

Previtali, P., & Cerchiello, P. (2023a). Corporate governance and anti-corruption disclosure. *Corporate Governance (Bingley)*, *23*(6), 1217–1232.

Previtali, P., & Cerchiello, P. (2023b). Corporate governance and anti-corruption disclosure. *Corporate Governance (Bingley)*, *23*(6), 1217–1232.

Priantana, R. D., & Yustian, A. (2011). *Pengaruh Struktur Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. *4*(1).

Puspita, N. D. (2024). Pengaruh Independensi, Gender Wanita, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan. *Bandung Conference Series Accountancy*,

4(1). https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11871

Ratu, D. M., & Rahajeng, D. K. (2024). Anti-Corruption Policy and Earnings Management: Do Women in Monitoring Roles Matter? *Asian Journal of Accounting Research*, *9*(4), 340–357. https://doi.org/10.1108/ajar-09-2023-0327

Rossouw, G. J. (2014). Balancing Corporate and Social Interests: Corporate Governance Theory and Practice. *African Journal of Business Ethics*, *3*(1).

Rusli, Y. M., & Felix, F. (2022). *Anti Corruption Disclosure dan Good Corporate Governance Era New Normal di Asia Tenggara*. *1*, 61–78.

Siagian, F., Siregar, S. V, & Rahadian, Y. (2013). Corporate Governance, Reporting Quality, and Firm Value: Evidence From Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, *3*(1), 4–20. https://doi.org/10.1108/20440831311287673

Tirtasari, I. D. A., & Hartomo, O. D. (2019a). Pengaruh GCG Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi. *Jurnal Akuntansi AKuntansi*, *17*(2), 131–149.

Tirtasari, I. D. A., & Hartomo, O. D. (2019b). Pengaruh GCG Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, *17*(2), 131. https://doi.org/10.24167/jab.v17i2.2337

Vian, T. (2020). Anti-Corruption, Transparency and Accountability in Health: Concepts, Frameworks, and Approaches. *Global Health Action*, *13*(sup1), 1694744. https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694744

Wijayati, N., Hermes, N., & Holzhacker, R. (2015). *Corporate Governance and Corruption: A Comparative Study of Southeast Asia*. 259–292.

Xia, T., Luo, X., Liao, Y., & Liu, W. (2018). *Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Corporate Performance Study*. https://doi.org/10.2991/sshr-17.2018.10

Yan-Leung, C., Connelly, J. T., Ping, J., & Limpaphayom, P. (2011). Does Corporate Governance Predict Future Performance? Evidence from Hong Kong. *Financial Management (Wiley-Blackwell)*, *40*(1), 159–197.

Yangzom, K., Gyeltshen, K., Tenzin, P., & Nepal, T. K. (2024). Gender Differences in Perceptions of Corruption: Insights From Bhutan. *Asian Journal of Advanced Research and Reports*, *18*(7), 266–282.

Zahwa, A., Safelia, N., & Z, R. W. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, *8*(2), 155–169. https://doi.org/10.22437/jaku.v8i2.27511

Zaitul, Elfiswandib, & Ilonab, D. (2019). Board of commissioners involvement and shareholder's wealth. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, *8*(2 Special Issue 9). https://doi.org/10.35940/ijrte.B1107.0982S919

Zaitul, Melmusi, Z., & Ilona, D. (2019). Corporate governance and bank performance: Global financial crisis 2008. *Journal of Reviews on Global Economics*, *8*, 625–636. https://doi.org/10.6000/1929-7092.2019.08.54

Zaitul, Melmusi, Z., & Ilona, D. (2021). Board Governance Diversity and the International Decision of Indonesia's Service Companies. *Estudios de Economia Aplicada*, *39*(4), 1–12. https://doi.org/10.25115/eea.v39i4.4309

Zaitul, Sandra, V. R., Yunilma, Hamdi, M., & Ilona, D. (2023). Women representation dan likuiditas saham. *E-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, *11*(1), 13–23.